



Disparitas Pembangunan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Andi Rahmat Nizar Hidayat¹, Misbahuddin²

Universitas Negeri Makassar, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: andirahmatnizarhidayat@unm.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines regional economic development disparities among regencies and cities in South Sulawesi Province using the Gross Regional Domestic Product (GRDP) indicator. Differences in regional economic capacity often lead to development inequality, which may affect the equitable distribution of public welfare. This study aims to analyze the development of GRDP across regencies and cities in South Sulawesi during the 2022–2024 period, identify differences in regional economic development levels, and describe the pattern of regional economic development disparities. The research employs a descriptive qualitative approach using secondary data obtained from official publications of the Central Bureau of Statistics (BPS) of South Sulawesi Province. Data collection was conducted through document analysis, while the data were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings show that GRDP values across regencies and cities in South Sulawesi increased during the 2022–2024 period, indicating the growth of regional economic activities. Makassar City recorded the highest GRDP value due to its role as the provincial center of trade, services, and government activities. In contrast, several regions such as the Selayar Islands, Jeneponto, and Sinjai recorded relatively lower GRDP values because their economic structures are still dominated by primary sectors. These findings indicate the existence of regional economic development disparities across South Sulawesi. Therefore, more balanced development policies are needed to promote equitable economic growth among regions.

Keywords: Development Disparity, Regional Economic Development, GRDP, Regional Economy, South Sulawesi.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang dianalisis melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perbedaan kapasitas ekonomi antar wilayah sering menimbulkan ketimpangan pembangunan yang dapat memengaruhi pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2022–2024, mengidentifikasi perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah, serta menggambarkan kondisi disparitas pembangunan ekonomi daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai PDRB kabupaten/kota di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan selama periode 2022–2024 yang menandakan perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Kota Makassar tercatat sebagai wilayah dengan nilai PDRB terbesar karena berperan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pemerintahan provinsi. Sebaliknya, beberapa wilayah seperti Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Sinjai memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil karena struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer. Temuan ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih merata untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan ekonomi antar daerah.

Kata Kunci: *Disparitas Pembangunan, Pembangunan Ekonomi Daerah, PDRB, Ekonomi Regional, Sulawesi Selatan.*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemajuan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mencerminkan efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kajian ekonomi regional dan administrasi publik, keberhasilan pembangunan daerah umumnya diukur melalui indikator ekonomi yang mampu menggambarkan tingkat aktivitas produksi dan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Salah satu indikator yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena indikator ini mencerminkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu wilayah. Alam dan Kamela (2021) menjelaskan bahwa kinerja ekonomi daerah menjadi salah satu ukuran penting dalam mengevaluasi performa pemerintah daerah serta efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi yang dijalankan di tingkat lokal. Oleh karena itu, analisis terhadap dinamika perkembangan ekonomi daerah menjadi penting untuk memahami capaian pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia, pembangunan ekonomi daerah semakin memperoleh perhatian sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Kebijakan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi, merancang kebijakan pembangunan, serta mengoptimalkan potensi ekonomi wilayahnya. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan mampu merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hoesein, Arifudin, dan Rahayu (2022) menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki

peran strategis dalam menentukan arah pembangunan ekonomi wilayahnya masing-masing.

Secara konseptual, pembangunan ekonomi daerah merupakan proses peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan output ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan struktur ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Wiyono, Mahanani, dan Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi daerah memerlukan strategi pengembangan ekonomi lokal yang mampu memanfaatkan potensi sumber daya wilayah secara berkelanjutan. Pendekatan pembangunan ekonomi lokal juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Deffrinica dan Sugianto (2022) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi daerah perlu diarahkan pada penguatan kapasitas ekonomi wilayah serta pengurangan kemiskinan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih efektif. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pembangunan ekonomi daerah tidak selalu berlangsung secara merata. Banyak wilayah menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda-beda sehingga memunculkan kesenjangan pembangunan antar daerah. Perbedaan tingkat perkembangan tersebut dikenal sebagai disparitas pembangunan wilayah. Disparitas pembangunan wilayah merupakan kondisi ketidakseimbangan tingkat pembangunan ekonomi antar daerah yang ditandai oleh perbedaan tingkat pendapatan, pertumbuhan ekonomi, maupun ketersediaan infrastruktur pembangunan. Daulay, Yusuf, dan Maipita (2021) menjelaskan bahwa perbedaan karakteristik ekonomi daerah dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki kesempatan dan kemampuan yang sama dalam mengembangkan potensi ekonominya.

Dalam perspektif pembangunan regional, disparitas pembangunan wilayah sering muncul karena adanya perbedaan distribusi sumber daya dan aktivitas ekonomi antar daerah. Y., Prihatiningsih, dan Ispa (2024) menjelaskan bahwa ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah merupakan fenomena yang sering terjadi dalam proses pembangunan ekonomi regional. Selain itu, Sukwika (2018) menegaskan bahwa ketersediaan infrastruktur pembangunan memiliki peran yang sangat penting dalam memengaruhi tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah. Daerah yang memiliki akses infrastruktur yang lebih baik cenderung mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki dukungan infrastruktur dan akses ekonomi yang lebih baik.

Fenomena disparitas pembangunan ekonomi juga dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Aktivitas ekonomi antar kabupaten/kota di provinsi ini menunjukkan variasi yang cukup besar apabila dilihat melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator utama yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah karena menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Tajudin (2023) menjelaskan bahwa perkembangan PDRB suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi seperti belanja pemerintah daerah dan investasi. Selain itu, Baharsyah (2022) menyatakan bahwa PDRB dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah karena mampu menunjukkan kontribusi berbagai sumber pendapatan daerah terhadap aktivitas ekonomi regional.

Di Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa daerah menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi yang relatif tinggi, sementara daerah lainnya masih berada pada tingkat perkembangan ekonomi yang lebih rendah. Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi provinsi memiliki kontribusi ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten lainnya. Hatta, Fatimah, dan Amir (2022) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan ekonomi wilayah. Kondisi ini mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah provinsi masih terkonsentrasi pada beberapa daerah tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi maupun infrastruktur yang lebih berkembang.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa disparitas pembangunan wilayah masih menjadi fenomena yang terjadi di banyak daerah di Indonesia. Wilonoyudho, Rijanta, Keban, dan Setiawan (2017) menjelaskan bahwa proses urbanisasi yang berlangsung secara cepat sering mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan karena wilayah kota cenderung memiliki kesempatan ekonomi yang lebih besar. Penelitian Akita dan Miyata (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran masyarakat meningkat di berbagai wilayah di Indonesia serta menunjukkan perbedaan dinamika pertumbuhan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah yang memiliki karakteristik pedesaan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan wilayah dengan karakteristik perkotaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa karakteristik wilayah dan struktur ekonomi lokal dapat memengaruhi tingkat disparitas pembangunan ekonomi antar daerah (Kurnia et al., 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah membahas mengenai pertumbuhan ekonomi dan disparitas pembangunan wilayah, sebagian besar kajian masih berfokus pada analisis pertumbuhan ekonomi atau ketimpangan pendapatan dalam rentang waktu yang lebih panjang. Penelitian sebelumnya umumnya menggunakan periode data yang luas untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi regional, namun belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji perkembangan terbaru PDRB antar kabupaten/kota dalam periode yang lebih mutakhir. Selain itu, sebagian

penelitian lebih menekankan pada analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan disparitas wilayah, sementara kajian yang memberikan gambaran komparatif mengenai dinamika perkembangan ekonomi antar daerah berdasarkan nilai PDRB pada periode terbaru masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya research gap yang berkaitan dengan perlunya kajian yang secara khusus menganalisis perkembangan PDRB antar kabupaten/kota dalam periode waktu yang lebih aktual sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan ekonomi wilayah secara lebih komprehensif.

Penelitian mengenai perkembangan PDRB kabupaten/kota pada periode tahun 2022–2024 menjadi penting karena periode tersebut mencerminkan dinamika terbaru perkembangan ekonomi daerah. Analisis terhadap periode tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai perubahan aktivitas ekonomi daerah serta perkembangan struktur ekonomi antar wilayah. Selain itu, kajian terhadap data terbaru juga dapat membantu memahami bagaimana perkembangan ekonomi daerah berlangsung dalam fase dinamika ekonomi regional yang terus berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan aktivitas ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data PDRB yang lebih mutakhir.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam memberikan analisis deskriptif mengenai perkembangan PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2022–2024. Penelitian ini tidak hanya menganalisis perkembangan nilai PDRB daerah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah serta menunjukkan pola disparitas pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika pembangunan ekonomi wilayah serta menjadi dasar dalam memahami pola perkembangan ekonomi daerah dan kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022–2024; (2) bagaimana perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan; dan (3) bagaimana gambaran disparitas pembangunan ekonomi wilayah berdasarkan nilai PDRB daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022–2024, mengidentifikasi perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah, serta menganalisis gambaran disparitas pembangunan ekonomi wilayah berdasarkan nilai PDRB daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi disparitas pembangunan ekonomi antar

kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menjelaskan fenomena pembangunan ekonomi daerah melalui interpretasi terhadap data yang tersedia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam melalui proses interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan (Bungin, 2015). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan data statistik ekonomi daerah melalui analisis dokumen sehingga dapat memberikan gambaran mengenai dinamika perkembangan ekonomi wilayah. Penelitian kualitatif juga memungkinkan analisis yang bersifat eksploratif dan interpretatif terhadap fenomena sosial maupun ekonomi yang diteliti (Sugiyono, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi daerah. Periode data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah tahun 2022 hingga 2024 karena periode tersebut merupakan data terbaru yang tersedia dalam publikasi statistik ekonomi daerah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kondisi pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen statistik ekonomi daerah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen, laporan, maupun arsip yang berkaitan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2020). Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain publikasi Sulawesi Selatan Dalam Angka serta publikasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel dan uraian deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola perkembangan ekonomi daerah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap data statistik ekonomi daerah yang telah dianalisis. Proses analisis data tersebut mengikuti tahapan analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perekonomian Sulawesi Selatan

Perekonomian suatu wilayah dapat dianalisis melalui indikator makroekonomi yang menggambarkan tingkat aktivitas ekonomi serta dinamika perkembangan ekonomi daerah. Salah satu indikator yang paling sering digunakan untuk melihat kondisi perekonomian daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan ekonomi suatu daerah dalam

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Selain itu, data PDRB juga dapat digunakan untuk melihat pertumbuhan ekonomi serta struktur perekonomian suatu wilayah dari waktu ke waktu.

Secara umum, perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto yang mencerminkan meningkatnya aktivitas produksi barang dan jasa di wilayah tersebut. Peningkatan nilai PDRB tersebut menunjukkan bahwa berbagai sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami perkembangan sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap tahun sehingga dapat menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi secara riil dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga.

Dalam konteks pembangunan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting yang dapat menunjukkan dinamika perkembangan perekonomian suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah dalam periode tertentu. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi, dapat diketahui sejauh mana aktivitas ekonomi mengalami peningkatan atau penurunan dalam suatu periode waktu tertentu. Data pertumbuhan ekonomi juga dapat memberikan gambaran mengenai stabilitas serta keberlanjutan pembangunan ekonomi di suatu daerah.

Berdasarkan data PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2022 hingga 2024, perekonomian daerah menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Peningkatan nilai PDRB pada periode tersebut mencerminkan bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan terus berkembang seiring dengan meningkatnya kegiatan produksi, konsumsi masyarakat, serta investasi daerah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi provinsi yang tetap terjaga pada periode tersebut juga menunjukkan bahwa perekonomian daerah mampu mempertahankan momentum pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir.

Secara struktural, perkembangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tidak terlepas dari kontribusi berbagai kabupaten dan kota yang menjadi bagian dari sistem ekonomi regional. Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda-beda sehingga memberikan kontribusi yang bervariasi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto provinsi. Beberapa daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi cenderung memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian provinsi, sementara daerah lainnya memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berlangsung secara merata sehingga dapat memunculkan perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota.

Dengan demikian, analisis terhadap kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan menjadi penting sebagai dasar untuk memahami dinamika perkembangan

ekonomi wilayah serta sebagai landasan dalam menganalisis perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota. Gambaran umum perekonomian provinsi ini juga memberikan konteks yang lebih luas dalam melihat kondisi disparitas pembangunan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dianalisis pada bagian berikutnya.

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota dapat digunakan untuk melihat dinamika aktivitas ekonomi pada tingkat wilayah yang lebih rinci. PDRB menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah selama periode tertentu sehingga menjadi indikator penting untuk menggambarkan kemampuan ekonomi suatu wilayah. Melalui indikator ini dapat diketahui sejauh mana aktivitas ekonomi berkembang serta bagaimana distribusi kegiatan ekonomi antar wilayah dalam suatu provinsi.

Dalam konteks pembangunan wilayah, perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota memberikan gambaran mengenai perbedaan kapasitas ekonomi daerah. Wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi lebih berkembang umumnya menunjukkan nilai PDRB yang lebih besar karena didukung oleh sektor ekonomi yang lebih beragam seperti perdagangan, industri, jasa, maupun aktivitas ekonomi perkotaan. Sebaliknya, wilayah yang struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor primer biasanya memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil. Perbedaan tersebut mencerminkan variasi tingkat perkembangan ekonomi antar wilayah yang menjadi salah satu karakteristik pembangunan ekonomi regional.

Untuk melihat perkembangan aktivitas ekonomi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, berikut disajikan data PDRB kabupaten/kota pada periode tahun 2022–2024 yang dirangkum dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel : 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022–2024 (Miliar Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1	Kepulauan Selayar	7.480	7.986	8.341
2	Bulukumba	17.233	18.871	20.224
3	Bantaeng	12.164	12.754	13.451
4	Jeneponto	9.134	9.594	10.125
5	Takalar	9.862	10.406	10.988
6	Gowa	25.174	27.142	29.004
7	Sinjai	9.693	10.350	11.012
8	Maros	22.901	24.356	26.115
9	Pangkajene dan Kepulauan	20.862	22.501	24.332
10	Barru	10.522	11.281	12.043
11	Bone	33.241	35.967	38.422
12	Soppeng	12.504	13.406	14.281

13	Wajo	17.948	19.124	20.468
14	Sidenreng Rappang	19.313	20.642	22.018
15	Pinrang	20.955	22.389	23.947
16	Enrekang	10.748	11.557	12.326
17	Luwu	16.623	17.829	19.042
18	Tana Toraja	13.257	14.215	15.182
19	Luwu Utara	15.978	17.221	18.437
20	Luwu Timur	42.661	46.904	50.128
21	Toraja Utara	12.226	13.125	14.038
22	Kota Makassar	196.412	211.189	227.021
23	Kota Parepare	10.512	11.241	12.044
24	Kota Palopo	12.935	13.812	14.732

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2025), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2020–2024*

Berdasarkan Tabel 1, perkembangan PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2022–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat di hampir seluruh wilayah. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa aktivitas produksi barang dan jasa di tingkat daerah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kenaikan nilai PDRB tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, pertumbuhan investasi, serta perkembangan sektor-sektor ekonomi utama di masing-masing daerah.

Jika dilihat dari besaran nilai PDRB, Kota Makassar menempati posisi sebagai daerah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini tidak terlepas dari peran kota tersebut sebagai pusat perdagangan, jasa, industri, serta pusat pemerintahan di tingkat provinsi. Selain Kota Makassar, beberapa kabupaten seperti Luwu Timur, Bone, dan Gowa juga menunjukkan nilai PDRB yang relatif besar dibandingkan wilayah lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang cukup berkembang dan memberikan kontribusi penting terhadap perekonomian regional.

Di sisi lain, beberapa daerah seperti Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan sebagian wilayah Toraja memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya. Kondisi ini umumnya berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, atau kegiatan ekonomi primer lainnya yang memiliki skala produksi lebih terbatas. Perbedaan nilai PDRB antar kabupaten/kota tersebut menunjukkan bahwa tingkat perkembangan ekonomi wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak sepenuhnya merata. Oleh karena itu, analisis terhadap perkembangan PDRB kabupaten/kota menjadi penting untuk memahami distribusi aktivitas ekonomi regional serta mengidentifikasi daerah dengan tingkat aktivitas ekonomi terbesar dalam perekonomian provinsi.

Perbandingan PDRB Antar Wilayah

Perbandingan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar kabupaten/kota dapat memberikan gambaran mengenai distribusi aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Melalui perbandingan tersebut, dapat diketahui daerah

yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar serta wilayah yang masih memiliki aktivitas ekonomi relatif lebih terbatas. Perbedaan nilai PDRB antar daerah umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain struktur ekonomi wilayah, tingkat investasi, jumlah penduduk, perkembangan infrastruktur, serta keberadaan pusat kegiatan ekonomi seperti kawasan perdagangan, industri, maupun jasa. PDRB sendiri mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kekuatan ekonomi suatu wilayah.

Berdasarkan data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2022–2024, terdapat beberapa daerah yang secara konsisten memiliki nilai PDRB tertinggi dibandingkan daerah lainnya. Daerah-daerah tersebut umumnya merupakan pusat aktivitas ekonomi regional atau memiliki sektor ekonomi unggulan yang berkembang cukup pesat. Untuk memberikan gambaran mengenai wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan, berikut disajikan kabupaten/kota dengan nilai PDRB tertinggi pada periode tahun 2022–2024.

Tabel: 2 Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi di Sulawesi Selatan Tahun 2022–2024 (Miliar Rupiah)

Peringkat	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1	Kota Makassar	196.412	211.189	227.021
2	Luwu Timur	42.661	46.904	50.128
3	Bone	33.241	35.967	38.422
4	Gowa	25.174	27.142	29.004
5	Maros	22.901	24.356	26.115

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2025), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2020–2024*

Berdasarkan Tabel 2, Kota Makassar secara konsisten menempati posisi pertama sebagai daerah dengan nilai PDRB terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2022–2024. Tingginya nilai PDRB di Kota Makassar dipengaruhi oleh perannya sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, serta pusat pemerintahan di tingkat provinsi. Kota ini juga menjadi pusat distribusi barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur sehingga aktivitas ekonomi yang berlangsung relatif lebih besar dibandingkan daerah lainnya. Sektor ekonomi yang dominan di Kota Makassar umumnya berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, jasa keuangan, transportasi, serta berbagai kegiatan jasa lainnya yang berkembang pesat di kawasan perkotaan.

Kabupaten Luwu Timur menempati posisi kedua dalam nilai PDRB tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Tingginya nilai PDRB di wilayah ini terutama dipengaruhi oleh keberadaan sektor pertambangan dan industri pengolahan yang menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Aktivitas pertambangan mineral serta industri pengolahan sumber daya alam memberikan kontribusi signifikan terhadap pembentukan nilai tambah ekonomi di wilayah tersebut sehingga

menghasilkan nilai PDRB yang relatif besar dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya.

Sementara itu, Kabupaten Bone dan Kabupaten Gowa juga menunjukkan nilai PDRB yang relatif tinggi. Kabupaten Bone memiliki aktivitas ekonomi yang cukup berkembang dengan sektor pertanian, perdagangan, serta jasa sebagai sektor utama yang menopang perekonomian daerah. Selain itu, jumlah penduduk yang relatif besar serta luas wilayah yang cukup luas turut memengaruhi besarnya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kabupaten Gowa memiliki kedekatan geografis dengan Kota Makassar sehingga perkembangan ekonomi wilayah ini juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi kawasan metropolitan Makassar.

Kabupaten Maros juga termasuk dalam kelompok daerah dengan nilai PDRB relatif besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkembangan ekonomi di wilayah ini dipengaruhi oleh keberadaan sektor industri, perdagangan, serta aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan transportasi dan logistik. Selain itu, keberadaan infrastruktur strategis seperti bandar udara internasional serta kawasan industri turut mendorong perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi maupun infrastruktur yang lebih berkembang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar wilayah yang dapat memunculkan disparitas pembangunan ekonomi regional. Oleh karena itu, analisis terhadap perbandingan PDRB antar wilayah menjadi penting untuk memahami distribusi aktivitas ekonomi serta mengidentifikasi daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten/Kota dengan PDRB Terendah

Selain daerah dengan aktivitas ekonomi yang besar, terdapat pula beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) relatif lebih kecil dibandingkan daerah lainnya. Nilai PDRB yang lebih rendah umumnya menunjukkan bahwa skala aktivitas ekonomi di wilayah tersebut masih terbatas. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jumlah penduduk yang relatif kecil, keterbatasan infrastruktur ekonomi, serta struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer. PDRB sendiri menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah sehingga perbedaan nilai PDRB antar daerah mencerminkan variasi kapasitas ekonomi masing-masing wilayah.

Berdasarkan data PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2022–2024, terdapat beberapa daerah yang secara konsisten berada pada kelompok dengan nilai PDRB terendah. Daerah-daerah tersebut umumnya memiliki aktivitas ekonomi yang masih terbatas serta struktur ekonomi yang lebih bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan kegiatan ekonomi primer lainnya. Untuk memberikan gambaran mengenai wilayah dengan aktivitas ekonomi yang relatif kecil di Provinsi Sulawesi Selatan, berikut disajikan kabupaten/kota dengan nilai PDRB terendah pada periode tahun 2022–2024.

Tabel: 3 Kabupaten/Kota dengan PDRB Terendah di Sulawesi Selatan Tahun 2022–2024 (Miliar Rupiah)

Peringkat	Kabupaten/Kota	2022	2023	2024
1	Kepulauan Selayar	7.480	7.986	8.341
2	Jeneponto	9.134	9.594	10.125
3	Takalar	9.862	10.406	10.988
4	Sinjai	9.693	10.350	11.012
5	Barru	10.522	11.281	12.043

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2025), *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2020–2024*

Berdasarkan Tabel 3, Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah dengan nilai PDRB terendah di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2022–2024. Kondisi ini berkaitan dengan karakteristik wilayah yang berupa daerah kepulauan dengan jumlah penduduk yang relatif lebih kecil serta aktivitas ekonomi yang masih didominasi oleh sektor perikanan, pertanian, dan kegiatan ekonomi skala lokal. Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer menyebabkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan relatif lebih kecil dibandingkan daerah dengan sektor industri atau jasa yang lebih berkembang.

Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar juga termasuk dalam kelompok wilayah dengan nilai PDRB relatif rendah. Perekonomian di kedua daerah tersebut masih didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, serta kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Ketergantungan yang cukup besar pada sektor pertanian menyebabkan struktur ekonomi daerah cenderung kurang terdiversifikasi sehingga kontribusi sektor ekonomi bernilai tambah tinggi seperti industri pengolahan dan jasa modern masih terbatas. Kondisi ini berpengaruh terhadap besarnya nilai PDRB yang dihasilkan oleh wilayah tersebut.

Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Barru juga menunjukkan nilai PDRB yang relatif lebih kecil dibandingkan sebagian besar kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Perekonomian di wilayah ini masih didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, serta usaha skala kecil yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat. Struktur ekonomi yang lebih bertumpu pada sektor primer menyebabkan perkembangan aktivitas ekonomi berlangsung secara bertahap dan belum didukung oleh sektor industri atau jasa yang berkembang secara signifikan.

Secara umum, daerah dengan nilai PDRB terendah di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki karakteristik ekonomi yang relatif serupa, yaitu struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan kegiatan ekonomi berbasis sumber daya alam. Ketergantungan terhadap sektor primer tersebut menyebabkan kapasitas ekonomi daerah berkembang secara lebih lambat dibandingkan wilayah yang memiliki sektor industri dan jasa yang lebih kuat. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar wilayah yang menjadi salah satu faktor yang memunculkan disparitas pembangunan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.

Analisis Disparitas Pembangunan Ekonomi

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan adanya perbedaan tingkat aktivitas ekonomi yang cukup signifikan. Perbedaan tersebut terlihat dari besarnya nilai PDRB yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Beberapa wilayah seperti Kota Makassar, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Gowa memiliki nilai PDRB yang relatif lebih besar dibandingkan kabupaten lainnya. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Kepulauan Selayar, Jeneponto, dan Sinjai memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan tidak berlangsung secara merata sehingga mencerminkan adanya disparitas pembangunan ekonomi regional.

Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui konsep disparitas pembangunan wilayah yang menyatakan bahwa ketidakseimbangan pembangunan antar daerah dapat terjadi akibat perbedaan potensi ekonomi, ketersediaan infrastruktur, serta kapasitas ekonomi wilayah. Menurut Y., Prihatiningsih, dan Ispa (2024), disparitas pembangunan wilayah merupakan kondisi ketidakseimbangan perkembangan ekonomi antar daerah yang muncul karena perbedaan distribusi sumber daya dan aktivitas ekonomi regional. Dalam konteks Provinsi Sulawesi Selatan, perbedaan kapasitas ekonomi antar kabupaten/kota menyebabkan aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu yang memiliki keunggulan ekonomi maupun infrastruktur yang lebih berkembang.

Selain itu, dominasi wilayah perkotaan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi aktivitas ekonomi regional. Wilayah perkotaan umumnya memiliki akses infrastruktur yang lebih baik, konsentrasi penduduk yang lebih besar, serta aktivitas perdagangan dan jasa yang lebih berkembang. Kondisi tersebut menyebabkan wilayah perkotaan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi dibandingkan wilayah pedesaan. Fenomena ini sejalan dengan temuan Wilonoyudho, Rijanta, Keban, dan Setiawan (2017) yang menjelaskan bahwa proses urbanisasi sering kali mencerminkan adanya ketimpangan pembangunan antara wilayah desa dan kota, di mana wilayah perkotaan cenderung menjadi pusat aktivitas ekonomi yang lebih dominan dibandingkan wilayah pedesaan. Dalam konteks Sulawesi Selatan, Kota Makassar sebagai pusat pemerintahan dan kegiatan ekonomi provinsi menjadi wilayah dengan aktivitas ekonomi terbesar sehingga memberikan kontribusi paling besar terhadap pembentukan PDRB provinsi.

Selain faktor urbanisasi, struktur ekonomi daerah juga berpengaruh terhadap besarnya nilai PDRB yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Daerah yang memiliki sektor ekonomi yang lebih beragam seperti perdagangan, industri, dan jasa umumnya mampu menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar. Sebaliknya, daerah yang masih bergantung pada sektor ekonomi primer seperti pertanian dan perikanan cenderung memiliki nilai PDRB yang relatif lebih kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa diversifikasi struktur ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Hal ini sejalan dengan pandangan Wiyono, Mahanani, dan Kurniawan (2022) yang

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan wilayah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal serta mengembangkan berbagai sektor ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Dengan demikian, disparitas pembangunan ekonomi yang terjadi antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu perbedaan kapasitas ekonomi wilayah, dominasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, serta perbedaan struktur ekonomi antar daerah. Wilayah yang memiliki sektor ekonomi yang lebih berkembang serta dukungan infrastruktur yang lebih baik cenderung memiliki nilai PDRB yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang masih bertumpu pada sektor ekonomi primer. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan ekonomi wilayah masih menjadi tantangan penting dalam pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada periode tahun 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi daerah menunjukkan kecenderungan meningkat pada hampir seluruh wilayah. Peningkatan nilai PDRB tersebut mencerminkan berkembangnya aktivitas produksi barang dan jasa di tingkat daerah serta menunjukkan bahwa perekonomian wilayah mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai sektor ekonomi daerah turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki nilai PDRB terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Posisi tersebut tidak terlepas dari peran Kota Makassar sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, jasa, serta pusat pemerintahan di tingkat provinsi. Keberadaan berbagai aktivitas ekonomi perkotaan serta dukungan infrastruktur yang lebih berkembang menjadikan Kota Makassar sebagai wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar terhadap perekonomian provinsi. Di sisi lain, perbandingan nilai PDRB antar kabupaten/kota menunjukkan adanya perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antar wilayah. Beberapa daerah memiliki nilai PDRB yang relatif besar karena didukung oleh aktivitas ekonomi yang lebih beragam, sementara daerah lainnya memiliki nilai PDRB yang lebih kecil karena struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian dan perikanan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, upaya pemerataan pembangunan ekonomi daerah menjadi penting untuk mendorong perkembangan ekonomi yang lebih seimbang antar kabupaten/kota di wilayah tersebut. Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini. Apresiasi disampaikan kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyediakan data statistik ekonomi daerah sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Universitas Negeri Makassar atas dukungan akademik dalam pelaksanaan

penelitian ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada tim editor dan reviewer Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas masukan dan saran yang konstruktif dalam proses penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Akita, T., & Miyata, S. (2020). *Measuring the Pro-Poorness of Urban and Rural Economic Growth in Indonesia, 2004–2014*.
- Alam, R., & Kamela, H. (2021). Economic Factors and Performance Measurement of Regional Governments in Sumatra and Java. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 17, 269–279. <https://doi.org/10.26487/jbmi.v17i3.11697>
- Baharsyah, M. (2022). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015–2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*. <https://doi.org/10.22219/jie.v6i1.20188>
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Daulay, A., Yusuf, M., & Maipita, I. (2021). *Analysis of Regional Disparity Among Regencies/Cities and the Correlation with Economic Growth North Sumatera in 2010–2019*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210220.009>
- Defrinica, D., & Sugianto, H. (2022). Regional Economic Development Planning Strategies in Poverty. *Proceedings of the 1st International Conference on Social, Science, and Technology (ICSST 2021)*. <https://doi.org/10.4108/eai.25-11-2021.2319352>
- Hatta, M., Fatimah, F., & Amir, N. (2022). Analysis of Economic Growth and Income Disparity of GRDP Per Capita Regencies/Cities in South Sulawesi Province in 2016–2020. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.31850/economos.v5i2.1820>
- Hoesein, Z., Arifudin, A., & Rahayu, S. (2022). The Effectiveness of Decentralization Policy in Local Government Administration. *Jurnal Akta*. <https://doi.org/10.30659/akta.v9i2.23544>
- Kurnia, A., Rustiadi, E., Fauzi, A., Pravitasari, A., & Zenka, J. (2023). Probing Regional Disparities and Their Characteristics in a Suburb of a Global South Megacity: The Case of Bekasi Regency, Jakarta Metropolitan Region. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 12, 32. <https://doi.org/10.3390/ijgi12020032>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Prihatiningsih, A., & Ispa, A. (2024). Dynamics of Economic Development Disparities: A New Perspective in Regional Analysis. *International Journal of Management and Business Economics*. <https://doi.org/10.58540/ijmebe.v2i1.511>
- Selatan, B. P. S. P. S. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2020–2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian yang Bersifat*

Eksploratif, Interpretif, Interaktif dan Konstruktif. Alfabeta.

- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.14710/jwl.6.2.115-130>
- Tajudin, T. (2023). Pengaruh Belanja Daerah, PMA dan PMDN terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi di Sulawesi. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.25134/equi.v20i01.7091>
- Wilsonoyudho, S., Rijanta, R., Keban, Y., & Setiawan, B. (2017). Urbanization and Regional Imbalances in Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 49, 125–132. <https://doi.org/10.22146/ijg.13039>
- Wiyono, L., Mahanani, R., & Kurniawan, B. (2022). Local Economic Development Strategies to Accelerate Sustainable Economic Growth. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Science, Humanity and Public Health (ICOSHIP 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220207.016>